

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)*

Perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat memberikan kemudahan sekaligus membuka peluang bagi siapa saja untuk memulai usaha. Dari tahun ke tahun, teknologi mengalami peningkatan yang signifikan dengan tujuan untuk menciptakan inovasi yang lebih canggih dan membawa dampak besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia. Perkembangan teknologi ini juga dirasakan secara nyata di Indonesia.⁴ Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan ini adalah teknologi finansial (*financial technology*), yang mengubah metode pembayaran dari yang semula menggunakan uang tunai menjadi berbasis digital. Transformasi ini turut melahirkan sebuah teknologi baru bernama QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Meskipun pemerintah telah banyak melakukan sosialisasi terkait QRIS, tampaknya jumlah pengguna teknologi ini masih tergolong terbatas.

⁴ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan *Perspektif Ekonomi Islam*," *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–163.

Pertumbuhan teknologi finansial (*financial technology*) di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam sektor sistem pembayaran. Salah satu bentuk pergeseran yang terjadi adalah perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non-tunai. Metode pembayaran non-tunai atau digital (*cashless*) kini semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya inovasi baru berupa penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Teknologi QRIS hadir sebagai bentuk standarisasi kode QR untuk digunakan dalam transaksi pembayaran. QR Code sendiri merupakan metode pembayaran yang menggunakan dompet digital (*e-wallet*) maupun layanan mobile banking. Di Indonesia, berbagai dompet digital yang populer meliputi OVO, GoPay, DANA, LinkAja, ShopeePay, dan lainnya. Penggunaan QR Code dinilai sangat bermanfaat karena memberikan kemudahan, kepraktisan, serta keamanan dalam bertransaksi. Saat ini, mayoritas masyarakat telah terbiasa menggunakan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai kebutuhan, seperti pembayaran jalan tol, transportasi online, parkir digital, belanja di minimarket, hingga pembelian pulsa.⁵

⁵ Lina Evira Permata Sari, Fuad Hasyim, Miftaql Janah, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Qris Pada Generasi Milenial Kabupaten Sukoharjo," jurnal ekonomi dan bisnis islam 2 (2023): 125–126.

1. Pengertian QRIS

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR nasional yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran menggunakan kode QR di Indonesia. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Tujuan utama QRIS adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi pembayaran digital bagi masyarakat, sekaligus memungkinkan pengawasan oleh pihak regulator. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa merchant kini tidak perlu menyediakan berbagai aplikasi pembayaran atau e-wallet, cukup dengan satu QR Code yang dapat dipindai oleh konsumen menggunakan berbagai aplikasi e-wallet yang ada di ponsel mereka.⁶

Quick Response Code Indonesian Standard, atau disingkat QRIS (dibaca KRIS), adalah integrasi berbagai QR Code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan menjaga keamanan

⁶Fahira Nur Pratiwi, “Pengaruh Metode Pembayaran QRIS Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung,” *International Journal Administration, Business & Organization* 4, no. 3 (2023): 79–87.

proses transaksi menggunakan QR Code. Semua PJSP yang ingin menggunakan QR Code untuk pembayaran diwajibkan menerapkan QRIS. QRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang dirancang untuk sistem pembayaran di Indonesia, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).⁷

QR Code adalah sekumpulan kode matriks atau barcode dua dimensi yang menyimpan informasi seperti identitas pengguna, jumlah pembayaran, dan mata uang. Kode ini dapat dibaca oleh perangkat tertentu yang digunakan dalam transaksi pembayaran. Di Indonesia, ini dikenal sebagai QRIS, atau QR Code Indonesian Standard. QRIS adalah standar QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia).

QRIS memiliki karakteristik, yang terdiri dari:

- a. Universal: mencakup semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan baik di dalam maupun luar negeri.

⁷ Euricho Guterres Mindo Nainggolan, Bonardo T F Silalahi, and Ertitin M Sinaga, "Analisis Kepuasan Gen Z Dalam Menggunakan QRIS Di Kota Pematangsiantar," *Manajemen : Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (2022): 24–32.

- b. Gampang: memungkinkan transaksi yang mudah dan aman dalam satu genggam.
- c. Untung: efisien karena satu kode QR dapat digunakan untuk semua aplikasi.
- d. Langsung: transaksi dilakukan secara cepat dan instan, mendukung kelancaran sistem pembayaran.

2. Manfaat QRIS

Penerapan QRIS sebagai standar nasional untuk penggunaan QR Code membawa dampak positif yang signifikan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Proses pembayaran menjadi lebih efisien. Hal ini menyederhanakan transaksi dan menjadikannya lebih praktis. Para pedagang cukup memiliki satu QRIS untuk menerima pembayaran dari berbagai layanan yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia. Sistem ini juga mempercepat dan mempermudah transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Selain itu, penggunaan QRIS membantu mengurangi risiko peredaran uang palsu, karena seluruh proses pembayaran dilakukan secara digital, sehingga tidak lagi terjadi pertukaran uang fisik.⁸

⁸ Kavin Fathul Adzim, “*Optimalisaasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS Pada Street Food Stadion Mulana*”

a. **Manfaat QRIS bagi Pengguna:**

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.
- 2) Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai.
- 3) Aman digunakan karena QRIS telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.

b. **Manfaat QRIS bagi Merchant (Penjual):**

- 1) Mengurangi penggunaan uang tunai
- 2) Memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan dalam bertransaksi.
- 3) Setiap transaksi otomatis tercatat dan dapat dilacak oleh pelanggan melalui riwayat pembayaran.
- 4) Dapat diakses melalui berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, DANA, OVO, ShopeePay, dan lainnya yang telah mendukung QRIS.
- 5) Mengurangi potensi kerugian akibat menerima uang palsu.⁹

Yusuf Di Banten Universitas Bina Bangsa” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 3, no. 2 (2025): 338–351.

⁹ Zahra Latifah, Asep Hidayat, Surya Lesmana, “*Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,*” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 6 (2022): 6707–6714.

3. Metode QRIS

a. Metode Statis

Metode ini memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut:

- 1) QR Code ditampilkan dalam bentuk stiker atau media cetak lainnya.
- 2) QR Code yang digunakan bersifat tetap dan berlaku untuk semua transaksi.
- 3) QR Code belum memuat nilai pembayaran tertentu, sehingga konsumen perlu memasukkan jumlah pembayaran secara manual.

b. Metode Dinamis

Metode ini ditandai dengan karakteristik berikut:

- 1) QR Code dicetak secara langsung melalui mesin EDC dalam bentuk struk.
- 2) Setiap transaksi menghasilkan QR Code yang berbeda.
- 3) QR Code tersebut sudah mencantumkan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh konsumen.¹⁰

¹⁰ Fahira Nur Pratiwi, "Pengaruh Metode Pembayaran QRIS Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung." *Journal Administration, Business & Organization* Vol. 4 (No.3), 2023: 79-87 | E-ISSN 2721-5652

Indikator Tentang Penggunaan QRIS

a. Kemudahan transaksi melalui QRIS

Kemudahan penggunaan QRIS memengaruhi minat wirausahawan menerapkan teknologi ini dalam usaha mereka. QRIS menawarkan proses pembayaran yang cepat, efisien, dan praktis, menarik bagi pelanggan dan penjual.¹¹ Salah satu kelebihan utamanya adalah fitur transaksi yang praktis, seperti dapat digunakan di semua aplikasi mobile banking tanpa perlu mengisi ulang saldo, serta tidak dikenakan biaya administrasi.

b. Penggunaan QRIS yang Lebih Praktis

Transaksi menggunakan QRIS menawarkan kemudahan dan efisiensi yang tinggi, seperti mempercepat proses pembayaran dan mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pengguna cukup memindai kode QR yang disediakan oleh penjual untuk menyelesaikan pembayaran. Selain itu, QRIS juga mendukung

¹¹ Ersya Ramdhania Dewi Politeknik Dalfa Afsaliani, Difa Fadzrulloh Rustandi, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Sebagai Transaksi Pembayaran Terhadap Minat Wirausahawan Dalam Menggunakan QRIS" 10, no. 14 (2024): 1–23.

proses transfer ke rekening bank secara cepat dan mudah.

c. Manfaat dan Keuntungan Penggunaan QRIS

QRIS memberikan berbagai keuntungan bagi penggunaannya melalui beragam promosi menarik, salah satunya berupa diskon yang membuat belanja menjadi lebih hemat. Promosi ini meningkatkan kepuasan pengguna karena mampu menurunkan harga belanja dari harga normal. Selain itu, QRIS juga sering bekerja sama dengan berbagai toko untuk menawarkan penawaran menarik.¹²

Menggunakan sistem pembayaran seperti QRIS tidak hanya akan menguntungkan bagi pebisnis atau merchant, tetapi juga bagi konsumen yang melakukan pembayaran. QRIS ini tentunya digunakan untuk mempermudah transaksi dan membuatnya lebih cepat. Hal ini bisa meningkatkan kemungkinan pembelian dan pembayaran non tunai. Sistem pembayaran digital khususnya dengan QRIS ini adalah cara yang lebih cepat dibanding pembayaran tunai, yang dimana

¹² Rendy Usmany et al., “Persepsi Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Terhadap Penggunaan Fintech Qris,” *Jurnal Akuntansi Manado* 5, no. 3 (2024): 618–626.

tidak perlu menunggu kasir memberikan kembalian maupun terkendala dengan hal-hal lainnya.¹³

B. USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Dalam era globalisasi, pembangunan sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Pembangunan ekonomi menjadi aspek krusial bagi suatu negara karena berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen utama dalam pembangunan ekonomi nasional adalah peran aktif masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang posisi penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga harus berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain aspek ekonomi, pembangunan mencakup bidang sosial, politik, dan budaya. Tiga ciri utama dari pembangunan ekonomi yaitu: sebagai suatu proses

¹³ Lenni Mariyati, Idris Saleh , Ahmad Wardana, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 09 (2023): 53.*

berkelanjutan, bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita, dan harus berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam merancang serta melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. UMKM dinilai sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja secara masif dan perannya dalam pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, UMKM juga telah diakui sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi nasional, terlepas dari skala perekonomiannya.

Peran UMKM sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia karena jumlah usahanya yang besar dan tersebar di berbagai sektor ekonomi, potensi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Walau memiliki potensi besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal.¹⁴

¹⁴ Asep Hidayat, Surya Lesmana, “Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Inovasi Penelitian no 6, vol 3(2022) : 6707-6714

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, dan tidak merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi syarat sebagai usaha kecil. Usaha menengah sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang juga bersifat independen, dikelola oleh individu atau badan usaha, dan tidak terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.¹⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian yang lebih rinci mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mengacu pada jumlah karyawan. Menurut BPS, Usaha Kecil merupakan

¹⁵ Mahaitin H Sinaga, Sri Martina, and Djahotman Purba, "Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ilmiah Accusi* 6, no. 1 (2024): 151–160.

usaha yang mempekerjakan antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang.¹⁶

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang beroperasi dalam skala kecil dan memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks perpajakan, UMKM diartikan sebagai wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. UMKM dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kekayaan bersih dan omzet tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000.
- b. Usaha Kecil: Usaha ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang

¹⁶ Cindy Yolanda, “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–186.

perusahaan besar, dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, atau omzet tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.

- c. Usaha Menengah: Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, atau hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000

Karakteristik UMKM meliputi manajemen yang mandiri, modal yang disediakan sendiri, pemasaran yang terbatas di daerah lokal, aset yang relatif kecil, dan jumlah karyawan yang sedikit. Prinsip dasar pelaksanaan UMKM adalah kerja sama, ekonomi demokratis, kemandirian, keseimbangan, keberlanjutan, efisiensi, keadilan, dan kesatuan ekonomi nasional. Banyak UMKM yang kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank, terutama dalam hal pembukuan yang baik. Pembukuan yang tepat sangat penting dalam mengelola keuangan usaha dan menjadi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Fungsi pembukuan usaha bukan hanya untuk kepentingan eksternal, tetapi juga untuk keperluan internal, seperti membantu pengusaha dalam

mengendalikan keuangan dan memisahkan keuangan usaha dengan pribadi. Salah satu aspek yang diperhatikan oleh lembaga pemberi kredit (baik perbankan maupun non-perbankan) dalam analisis kredit adalah aspek keuangan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai dan belum memahami pentingnya pembukuan dalam kelangsungan usaha mereka.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan maupun jumlah usaha yang berkembang. UMKM merupakan sektor usaha yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan jumlah usaha yang berkembang.

Digitalisasi UMKM merujuk pada pemanfaatan hasil pasar untuk pengembangan produk yang dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM di bidang teknologi, yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha di Indonesia.¹⁷

UMKM memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian suatu negara, sehingga kehadirannya

¹⁷ Dewi Murtiningsih Rona Tumiur Mauli Caroline, “*Digitalisasi UMKM*,” [Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 7 (2024): 1387–1400.

sangat diharapkan oleh berbagai negara karena kontribusinya yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi mereka yang siap bekerja namun belum memiliki pekerjaan, sehingga dapat menekan angka pengangguran. Pertumbuhan usaha mikro membuka lebih banyak lapangan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Penurunan angka pengangguran menunjukkan bahwa sektor UMKM banyak menyerap tenaga kerja, yang turut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, UMKM turut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan hasil pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁸

Ada beberapa kriteria dalam UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

¹⁸ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84.

- b. Usaha kecil memiliki nilai aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dengan hasil penjualan tahunan antara Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 miliar.
- c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 100 miliar, dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 miliar hingga maksimum Rp 50 miliar.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Data BPS dan Kementerian Koperasi ,dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, hanya 1% saja usaha menengah dan besar.¹⁹

¹⁹ Sarfiah Sudati Nur and Dian Marlina Verawati. , Hanung Eka Atmaja., “*UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,*” Riset Ekonomi Pembangunan 4, no. 2 (2023): 161–173,

2. Ciri-ciri UMKM

Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- a. Menggunakan teknologi yang sederhana atau manual sehingga mudah ditransfer ke pihak lain, dengan bahan baku yang mudah ditemukan. Keterampilan dasar umumnya diwariskan secara turun-temurun. Usaha ini memiliki peluang pasar yang cukup besar, bersifat padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Sebagian besar produknya dijual di pasar lokal atau dalam negeri, meskipun ada juga yang berpotensi untuk dipasarkan ke luar negeri.²⁰
- b. Belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, bahkan dalam bentuk paling sederhana sekalipun.
- c. Tingkat pendidikan pelaku usaha atau sumber daya manusianya umumnya masih rendah, kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar, serta belum memiliki mentalitas kewirausahaan yang kuat.

²⁰ Evi Suryani, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo),” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 3 (2021): 1–4.

- d. Sebagian besar pelaku usaha belum familiar dengan lembaga perbankan, dan lebih cenderung menggunakan jasa rentenir atau tengkulak sebagai sumber pembiayaan.
- e. Legalitas usaha seringkali belum dimiliki, termasuk izin usaha maupun dokumen penting lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Jumlah tenaga kerja sangat terbatas, biasanya tidak lebih dari empat orang. Pelaku usaha mikro yang tergabung dalam koperasi pun umumnya juga berskala sangat kecil.
- g. Usaha mikro cenderung memiliki perputaran modal yang cepat, serta mampu menyerap dana cukup besar.
- h. Pelaku usaha mikro umumnya memiliki karakteristik rajin, hidup sederhana, dan terbuka terhadap pendampingan, terutama jika pendekatannya dilakukan dengan cara yang tepat.²¹

²¹ Rintan Saragih, “Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan Umkm Di Desa Baru Dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,” *Jurnal Kewirausahaan* 5, No. 1 (2020): 8.

3. Manfaat UMKM

a. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang krusial, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran.²²

b. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Sektor UMKM berkontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik, di mana produk yang dihasilkan tidak hanya memasuki pasar nasional, tetapi juga dapat menjangkau pasar internasional. Produk lokal, seperti kerajinan tangan, semakin diminati dan terkenal hingga ke luar negeri.

c. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk memulai usaha di sektor UMKM relatif mudah diperoleh, dengan banyak lembaga pemerintah yang menyediakan bantuan dan pinjaman dengan jumlah yang terjangkau. Bank juga menawarkan jaminan pinjaman dengan nilai kredit yang rendah.

²² Pongky Arie Wijaya Arianti Zahrah, “*Manfaat Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Unemployment Rate,*” *Jurnal Jurusan Tadris Ips 10, No. 2 (2022): 110–116.*

d. Operasional Yang Fleksibel

Dalam hal operasional, struktur kepemimpinan di sektor UMKM tidak terlalu rumit, di mana setiap pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Umumnya, bisnis di sektor ini lebih fokus pada selera konsumen dan tren yang sedang berkembang.²³

C. PELATIHAN DAN DUKUNGAN TEKNIS

1. Pengertian Pelatihan

Menurut Michael Armstrong, pelatihan adalah pengembangan sistematis dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan oleh seseorang untuk berkinerja secara memadai sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan.

Pegawai sering disebut sebagai aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Ungkapan ini menegaskan betapa berharganya sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu "alat produksi" utama. Sama seperti aset lainnya seperti modal, gedung, teknologi, pabrik, kendaraan, sistem kerja, dan reputasi, pengembangan SDM juga membutuhkan strategi khusus.

²³ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dituntut untuk terus mengembangkan diri secara aktif, yakni sosok yang memiliki semangat untuk terus belajar dan bekerja keras, sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.²⁴

Pengembangan SDM merupakan bentuk investasi yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu cara investasi pada SDM adalah melalui pelatihan (training).

Pelatihan memiliki setidaknya empat manfaat utama bagi perusahaan, yaitu:

- a. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan
Pelatihan terkait penggunaan teknologi atau alat modern dapat meningkatkan kemampuan pegawai sehingga produktivitas mereka bertambah.
- b. Meningkatkan Standar Kualitas Produk dan Layanan

Pelatihan yang melibatkan para ahli internal perusahaan memungkinkan pegawai belajar teknik dan strategi terbaik dalam bekerja. Hal ini membantu

²⁴ Bella Febrianti et al., “*Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Juai Kabupaten Balangan*,” jurnal MSDM 2, no. 1 (2025): 1–10.

menciptakan keseragaman dalam proses kerja dan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan.

- c. Mengurangi Tingkat Pengunduran Diri Karyawan Pegawai yang mendapatkan

Pelatihan merasa dihargai atas perhatian perusahaan terhadap pengembangan mereka. Pelatihan meningkatkan kepuasan kerja, rasa memiliki, dan komitmen karyawan sehingga memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan serta meningkatkan tingkat retensi tenaga kerja.

- d. Mengurangi Biaya dan Kesalahan Operasional

Pelatihan yang efektif menghasilkan pegawai yang lebih terampil, sehingga waktu dan sumber daya yang terbuang untuk memperbaiki kesalahan, produk cacat, keterlambatan pengiriman, dan layanan buruk dapat diminimalkan.²⁵

2. Dukungan Teknis

Dukungan teknis adalah layanan yang diberikan untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan, memelihara, serta mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan teknologi, perangkat, atau sistem informasi

²⁵ Hadiningrat, June Kuncoro, et al. *Manajemen Pelatihan*. Pradina Pustaka, 2023.

sehingga dapat berfungsi secara optimal²⁶. Layanan ini mencakup pelatihan, konsultasi, pemecahan masalah (troubleshooting), serta pemeliharaan rutin agar pengguna dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien²⁷. Dukungan teknis sangat krusial, terutama dalam proses adopsi teknologi baru di berbagai sektor, termasuk pada UMKM yang mulai mengintegrasikan sistem pembayaran digital seperti QRIS²⁸. Dengan dukungan teknis yang memadai, hambatan teknis dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna, sekaligus mengurangi risiko kesalahan operasional yang bisa menyebabkan kerugian waktu dan biaya²⁹. Selain itu, dukungan teknis berperan penting dalam mempercepat transformasi digital, membangun kepercayaan pengguna, dan mendorong

²⁶ Putra, I. N., Wulandari, S. *Peran Dukungan Teknis dalam Implementasi Sistem Informasi Digital pada UMKM*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informasi, 12(2), 101-110.

²⁷ Sari, D. P., Nugroho, A. (2022). *Evaluasi Dukungan Teknis dalam Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM*. Jurnal Sistem Informasi Terapan, 9(1), 45-52.

²⁸ Hartanto, B., Widjaja, T. (2021). *Analisis Pengaruh Dukungan Teknis Terhadap Adopsi Teknologi Digital di Perusahaan Kecil*. Jurnal Manajemen dan Teknologi, 7(3), 150-159.

²⁹ Wibowo, R., Lestari, S. (2024). *Implementasi Dukungan Teknis dalam Digitalisasi Usaha Mikro*. Jurnal Ilmiah Teknologi dan Bisnis, 15(1), 80-91.

keberlanjutan penggunaan teknologi di dalam organisasi maupun bisnis³⁰.

D. PENGUSAHA LOKAL

1. Pengertian Pengusaha Lokal

Pengusaha lokal adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di wilayah asal atau komunitas tempat tinggalnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Mereka umumnya menjual produk atau jasa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya³¹. Berbeda dengan perusahaan besar atau multinasional, pengusaha lokal biasanya mengelola usahanya dalam skala kecil hingga menengah dan memiliki hubungan yang erat dengan komunitas sosial maupun ekonomi setempat.

2. Peran Pengusaha Lokal

Pengusaha lokal berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah karena mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, dan membantu distribusi pendapatan

³⁰ Putri, A. S., Santoso, E. (2021). *Peranan Dukungan Teknis untuk Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi*. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 8(4), 210-220.

³¹ Nugroho, H. A., Lestari, D. (2021). *Peran Pengusaha Lokal dalam Mendorong Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 6(2), 77-86.

yang lebih merata³². Mereka juga turut menjaga stabilitas ekonomi lokal melalui perputaran uang yang terjadi dalam komunitas sendiri. Selain itu, pengusaha lokal membantu memanfaatkan potensi daerah, seperti hasil pertanian, kerajinan, makanan khas, dan budaya lokal sebagai basis usaha yang dapat dipasarkan secara luas³³.

3. Manfaat Pengusaha Lokal

Manfaat dari keberadaan pengusaha lokal tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya. Secara ekonomi, pengusaha lokal meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi berbasis lokal. Secara sosial, mereka memperkuat jalinan komunitas karena melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi dan pemasaran. Secara budaya, mereka melestarikan nilai-nilai lokal lewat produk-produk yang mencerminkan identitas daerah, seperti batik khas, kuliner tradisional, atau seni kerajinan tangan³⁴.

³² Yusuf, M., Hanafi, A. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Penguatan UMKM*. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, 8(3), 55–64.

³³ Rahayu, N., & Priyanto, D. (2024). *Strategi Pemberdayaan UMKM Lokal di Era Transformasi Digital*. Jurnal Inovasi Kewirausahaan, 13(1), 25–37.

³⁴ Wicaksono, A., Hidayat, R. (2022). *Usaha Lokal dan Kearifan Budaya: Kajian Terhadap UMKM Berbasis Tradisi*. Jurnal Ekonomi dan Sosial Budaya, 11(1), 35–44.

E. SOSIALISASI

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk mengenalkan sesuatu kepada masyarakat hingga mereka mengenal, memahami, dan menghayatinya atau disebut juga proses pemasyarakatan. Sosialisasi juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, atau memengaruhi masyarakat agar tetap menggunakan produk maupun jasa yang ditawarkan. Dalam konteks ini, sosialisasi merujuk pada proses penyampaian informasi sekaligus memengaruhi masyarakat agar memanfaatkan layanan yang disediakan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.³⁵

Berikut pengertian sosialisasi dari para ahli:

a. Charlotte Buhler:

Sosialisasi merupakan suatu proses yang memungkinkan individu untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dan pola pikir kelompoknya, sehingga ia dapat

³⁵ M Fidhul Akhyari, "Implementasi Konsep Sosialisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Edunomi: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 1, no. 01 (2024): 30–40.

menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota kelompok tersebut.

b. Peter Berger:

Sosialisasi adalah proses di mana seseorang mempelajari dan menginternalisasi norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya, yang pada akhirnya membentuk kepribadian dan cara pandangnya terhadap masyarakat.

c. Paul B.Horton:

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pembelajaran di mana individu memahami serta mengadopsi norma-norma masyarakat tempat ia tinggal, yang kemudian membentuk kepribadiannya.

d. Soerjono Soekanto:

Sosialisasi adalah suatu mekanisme penyampaian unsur-unsur budaya kepada anggota masyarakat yang baru, agar mereka dapat memahami dan beradaptasi dengan budaya tersebut.³⁶

Secara umum, definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi adalah kebutuhan kodrati manusia dalam penanaman nilai-nilai dan norma-

³⁶ A H Elyas, E Iskandar, and S Suardi, "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak Dalam Pemilu," *Warta Dharmawangsa* 14 (2020): 137–149,.

norma yang hidup dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini menghasilkan perilaku baru pada individu. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan daerah diharapkan dapat menjadi norma dan kebiasaan yang memberikan nilai positif bagi masyarakat.

2. Tujuan Sosialisasi

Tujuan sosialisasi untuk menyampaikan informasi dan pemahaman terkait isi atau inti dari kebijakan yang telah ditetapkan.³⁷ Bagi individu yang menerimanya meliputi:

- a. Memastikan setiap orang dapat hidup harmonis di dalam masyarakat, dengan memahami nilai dan norma yang berlaku.
- b. Membantu individu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan dan budaya masyarakat, yang memiliki norma yang mengikat anggotanya.
- c. Meningkatkan kesadaran individu akan keberadaan mereka dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Mengarahkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, dengan karakteristik yang baik.

³⁷ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar," *Stiacimahi.Ac.Id* 14, no. November (2023): 13–25.

- e. Mempertahankan keutuhan masyarakat, yang dapat terwujud melalui interaksi yang baik antar warganya.
- f. Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
- g. Mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, serta kemampuan membaca, menulis, dan bercerita.

3. Fungsi sosialisasi

Secara umum, sosialisasi berfungsi sebagai cara bagi individu untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa fungsi sosialisasi:

- a. Fungsi Sosialisasi bagi Individu: Sosialisasi berperan sebagai panduan untuk belajar memahami dan beradaptasi dengan nilai, norma, serta struktur sosial yang ada di sekitarnya.
- b. Fungsi Sosialisasi bagi Masyarakat: Sosialisasi berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan, menyebarkan, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada dalam masyarakat.³⁸

³⁸ Sadriah Lahamit, “*Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi*

Jika dilihat berdasarkan bentuknya, sosialisasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. **Sosialisasi formal**

yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara.

b. **Sosialisasi informal**

yakni sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan yang tidak resmi seperti keluarga, pertemanan, atau interaksi sosial sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.³⁹

4. **Metode Sosialisasi**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat membutuhkan metode yang tepat agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Menentukan pendekatan yang selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat lokal sangat krusial

Covid 19,” PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7, no. 1 (2021): 32–45.

³⁹Rini Ambarwati, Aidinil Zetra, and Syahrizal, “Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu,” Jurnal Niara 15, no. 3 (2023): 571–580.

untuk menjamin relevansi program. Di samping itu, sinergi antara berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha, dapat memperluas jangkauan serta hasil dari kegiatan pengabdian.

Menggunakan pendekatan partisipatif—dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesesuaian program. Keterlibatan ini juga memperdalam pemahaman atas kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kedua pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif dari komunitas dalam seluruh rangkaian program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang memiliki peran vital dalam menentukan arah dan hasil program pengabdian tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai pentingnya pendekatan ini dan bagaimana cara mendorong komunitas untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pengabdian.

Partisipatif dan kolaboratif mengedepankan penghargaan terhadap pengetahuan, pengalaman, dan

kebutuhan masyarakat dalam merancang serta melaksanakan program pengabdian. Komunitas biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi langkah yang bijak. Dengan cara ini, program pengabdian akan lebih relevan, memberikan manfaat nyata, dan berkelanjutan karena disesuaikan dengan konteks lokal serta kebutuhan masyarakat.

Salah satu cara untuk mendorong peran aktif komunitas adalah dengan membangun hubungan yang saling percaya antara kampus dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan menghargai pendapat semua pihak sangat penting dalam menciptakan hubungan kolaboratif. Melalui dialog yang berkesinambungan, kampus dapat lebih memahami kebutuhan, harapan, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sebaliknya, komunitas merasa dihargai dan didengarkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam program pengabdian.

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif juga menuntut adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang adil antara kampus dan masyarakat. Artinya, tidak hanya kampus yang menetapkan kebijakan dan

langkah-langkah program, tetapi juga mengakui keahlian, sumber daya, serta kepemimpinan yang ada dalam masyarakat. Dengan memberikan ruang bagi komunitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program akan lebih inklusif, demokratis, dan memberdayakan.⁴⁰



⁴⁰Arif Zunaidi, SHI., MEI , *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas, Sustainability* (Bekasi, 2024), h.35-37